



DPMPTSP
TANAH LAUT

2021



LAPORAN KINERJA

Dinas PM & PTSP

Dinas Penanaman Modal & PTSP



JL. Ahmad Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari



www.dpmpstptanahlautkab.go.id/



(0512) – 22323

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan capaian Kinerja DPMPTSP dimasa yang akan datang.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala DPMPTSP

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650116 199203 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja ini diketahui bahwa :

1. Pada Anggaran Murni tahun 2021, DPMPTSP mengelola Anggaran sebesar Rp 6.584.459.044,00 yang kemudian anggaran tersebut menjadi meningkat pada APBD Perubahan 2021 menjadi Rp 7.043.963.524,00.
2. Belanja Langsung DPMPTSP pada Anggaran Murni 2021 sebesar Rp 1.847.751.028,00 yang kemudian anggaran ini terkoreksi meningkat menjadi Rp 2.346.955.508,00 pada APBD 2021 Perubahaan.
3. Belanja Tidak Langsung DPMPTSP pada Anggaran Murni 2021 sebesar Rp 4.697.008.016,00. Pada APBD 2021 Perubahan anggaran belanja tidak langsung tidak mengalami peningkatan ataupun pengurangan dalam sisi jumlah namun mengalami pergeseran pada komponen tunjangan jabatan ASN yang bertambah sebesar Rp 4.000.000,00. Kemudian anggaran tersebut dialokasikan ke dalam tunjangan fungsional umum ASN.
4. Hasil serapan keuangan pada anggaran tahun 2021 adalah sebesar 57,63% yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2020 sebesar 74,64% ini berarti terjadi penurunan serapan sekitar 17,01%. Penurunan serapan anggaran ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang terjadi yang mengakibatkan banyaknya agenda kegiatan yang tidak dapat dilakukan seperti pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tatap muka yang kemudian harus disesuaikan menjadi pertemuan secara daring (dalam jaringan) atau secara online. Selain itu pameran yang sebelum pandemi rutin diikuti oleh DPMPTSP pada tahun 2021 masih belum bisa dilaksanakan. Meskipun terjadi penurunan realisasi anggaran tetapi capaian kinerja tidak menurun secara signifikan.
5. Hasil realisasi fisik pada anggaran tahun 2021 adalah sebesar 93% yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2020 sebesar 95,80% ini berarti terjadi penurunan kinerja fisik sekitar 2,80%. Penurunan ini juga disebabkan pengaruh kondisi pada Pandemi Covid-19, dan sama dengan penurunan di serapan keuangan yang tidak signifikan, penurunan capaian kegiatan fisik sebesar 2,80% ini juga tidak signifikan.

6. Pada Laporan Kinerja tahun 2021 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level Eselon II, Eselon III, hingga level Eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran ringkas pelaksanaan anggaran 2021 dan kinerja DPMPTSP Tanah Laut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	10
D. Produk dan Layanan	11
E. Sistematika Penyajian	17
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	20
A. Visi RPJMD	20
B. Misi RPJMD	20
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	21
D. Indikator Kinerja Utama	23
E. Perjanjian Kinerja	24
F. Program dan Kegiatan	28
Bab III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	31
1. Sasaran RPJMD	31
2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas	33
3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Dinas	35
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian	36
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan	37
3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan	38
4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang PNP Tertentu	39
5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang PNP Jasa Usaha	40
6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan Pelayanan Perizinan.....	41
7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Bidang Penanaman Modal.....	42
B. Akuntabilitas Keuangan	43
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021.....	44
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	47
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	51
Bab IV Penutup	61
A. Kesimpulan	61
B. Strategi Peningkatan Kinerja	61
Lampiran	
1. IKU	
2. Pernyataan Hasil Reviu	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan	
4. Cascading/Pohon Kinerja	
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)	
6. Monev Renstra	
7. Matrik Keselarasan	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja DPMPTSP selama tahun anggaran 2021.

Tahun Anggaran 2021 ini dapat dikatakan begitu banyak dinamika eksternal seperti masih berlangsungnya pandemi covid-19, pengurangan anggaran menyebabkan menurunnya tingkat capaian baik pada kinerja fisik dan keuangan merupakan kondisi yang harus menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

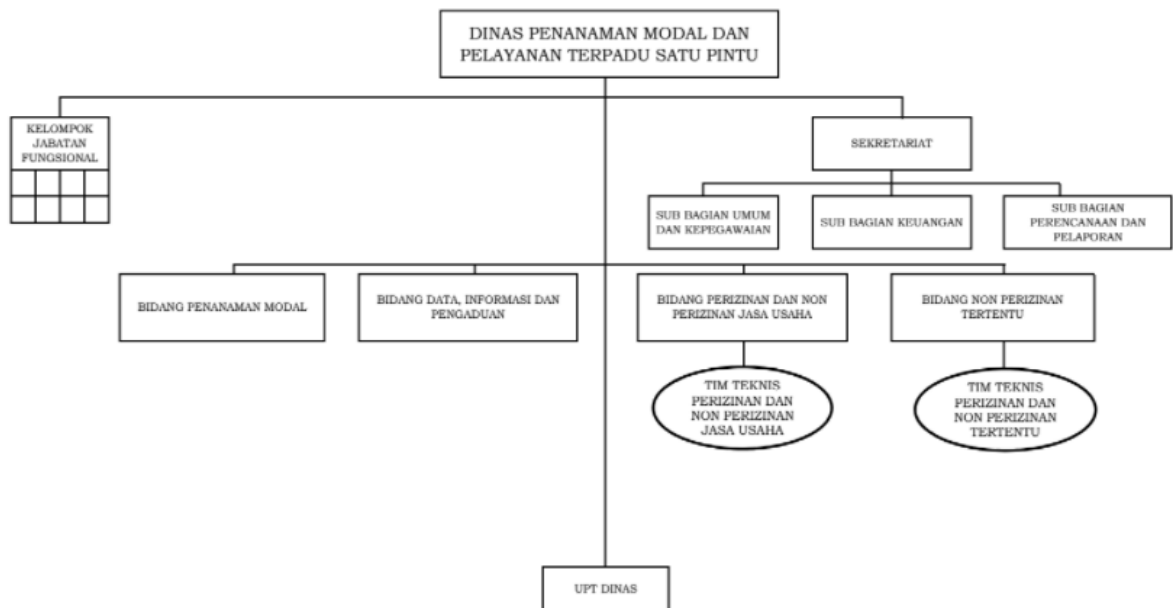
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program kegiatan;
- b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
- d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada bagan berikut :



Dari bagan diatas, DPMPTSP Tanah Laut dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan dibantu pula oleh 4 (empat) orang Kepala Bidang. Adapun detail numenklatur tiap jabatan yang ada di DPMPTSP yakni sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, yang membawahi 3 orang Kepala Sub Bagian yaitu:
 - 1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.
 - 2) Kasubbag Keuangan.
 - 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Penanaman Modal.
4. Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan.
5. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha.
6. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu

Terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- e. Pembinaan UPT Dinas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci, setiap jabatan yang ada di DPMPTSP mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b) Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d) Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e) Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
 - g) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h) Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i) Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana bidang penanaman modal
- 2) Perumusan kebijakan bidang penanaman modal
- 3) Penyusunan perencanaan penanaman modal
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal
- 5) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal

- 6) Pelaksanaan kerjasama, promosi dan investasi penanaman modal
- 7) Pelaksanaan pelayanan penanaman modal
- 8) Pelaksanaan pembuatan peta penanaman modal
- 9) Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing
- 10) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penanaman modal
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 12) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Data Informasi dan Pengaduan

Bidang Data Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan data dan informasi serta pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Data Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang data, informasi dan pengaduan
- 2) Perumusan kebijakan bidang data, informasi dan pengaduan
- 3) Penyusunan perencanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan
- 4) Perumusan kebijakan teknis pelayanan data, informasi dan pengaduan
- 5) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data, informasi dan pengaduan
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang data, informasi dan pengaduan

- 7) Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi
- 8) Pelaksanaan pengaduan pelayanan
- 9) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 11) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha

Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, perizinan dan nonperizinan jasa usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang pdan nonperizinan jasa usaha
- 2) Perumusan kebijakan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- 5) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan jasa usaha meliputi surat keterangan tempat usaha, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin usaha peternakan, pendaftaran peternakan rakyat, tanda daftar industri, izin usaha industri, izin usaha perkebunan, izin usaha konstruksi, izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), izin penangkapan ikan (SIPI), izin usaha

pengangkutan ikan (SIKPI), izin usaha perikanan, izin usaha toko modern, izin usaha pusat pembelanjaan, izin praktek dokter hewan, izin penyelenggaraan kursus, izin rumah sakit dan rumah sakit bersalin swasta, izin klinik swasta, izin klinik perusahaan, izin apotek, izin toko obat dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 6) Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan jasa usaha.
- 7) Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- 8) Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 10) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu

Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan perizinan tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
- 2) Perumusan kebijakan bidang perizinan dan nonperizinan tertentu

- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
- 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan nonperizinan tertentu
- 5) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu meliputi izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan/membongkar bangunan, izin hiburan umum, izin reklame, izin usaha perhotelan/penginapan, izin usaha rumah makan/restauran, izin pemanfaatan/pemungutan sarang burung walet, izin usaha perebengkelan, izin usaha kepariwisataan, izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, izin penggilingan padi dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu
- 7) Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu
- 8) Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan tertentu
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 10) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Tim Teknis

- a. Tim teknis adalah sebuah tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan
- b. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai

diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Badan/Dinas yang bersangkutan

- c. Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- d. Pelaksanaan Kerja Tim Teknis berada dan ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi DPMPTSP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPMPTSP di masa 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi / permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemukan, yaitu:

1. Realisasi investasi rendah

Realisasi investasi masih rendah diakibatkan oleh kurang maksimalnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut dan tidak adanya promosi investasi selama pandemi covid-19 (tahun 2020–

2021).

2. Penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan berusaha di daerah belum maksimal

Masalah ini disebabkan oleh daerah belum menyesuaikan nomenklatur kegiatan perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS). Selain itu belum tersusunnya Perda terkait pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan, belum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital, serta belum didelegasikannya persetujuan lingkungan oleh kepala daerah kepada kepala DPMPTSP. SDM belum sepenuhnya siap untuk bisa mengimplementasikan penyelenggaraan persyaratan dasar perizinan berusaha di daerah, karena perlu penyesuaian dan peningkatan kapasitas ASN melalui Bimbingan Teknis Sistem OSS.

3. Masih belum terpenuhinya nilai evaluasi kinerja pelayanan publik yang ditargetkan mendapat nilai A

Salah satu faktor yang menghambat terpenuhinya nilai evaluasi kinerja pelayanan publik untuk mendapat nilai A adalah belum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tanah Laut.

D. Produk dan Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2020 tentang endelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, maka DPMPTSP melayani perizinan dan nonperizinan sebagai berikut:

Pelayanan perizinan pada DPMPTSP, di antaranya:

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
2. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten.
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
4. Izin Membuka Tanah.

- (a) Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
5. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 6. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan.
 7. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu.
 8. Izin Usaha Perbengkelan.
 9. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten.
 10. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten.
 11. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
 12. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
 13. Izin Usaha Penyelenggaraan Penyeberangan.
 14. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal.
 15. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan, Sungai dan Danau.
 16. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.
 17. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
 18. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan.
 19. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 (dua puluh empat) Jam.
 20. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan.
 21. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan.
 22. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
 23. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana

- Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten).
24. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten).
 25. Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten.
 26. Izin Penutupan Jalan Umum.
 27. Izin Penyelenggaraan Kursus (Primagama, Komputer, dll).
 28. Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
 29. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
 30. Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten.
 31. Izin Rumah Sakit Bersalin Swasta.
 32. Izin Klinik Swasta.
 33. Izin Klinik Perusahaan.
 34. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.
 35. Izin Pendirian Apotek
 36. Izin Toko Obat
 37. Izin Toko Alat Kesehatan.
 38. Izin Optikal.
 39. Izin Praktek Akupuntur.
 40. Izin Praktek Panti Pijat/Refleksi.
 41. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
 42. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga.
 43. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 44. Izin Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Termasuk Pemberian Izin Memberikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.
 45. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

46. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
47. Izin Pembuangan Limbah Cair.
48. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
49. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
50. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
51. Izin Lingkungan.
52. Izin Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.
53. Izin Pendaaur Ulang Sampah, Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Oleh Swasta.
54. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
55. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LKPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - (a) Izin Perubahan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - (b) Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
56. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (Baru, Perpanjangan, dan Perubahan).
57. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (dengan wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten).
58. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (Dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten).
59. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
60. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

61. Izin Usaha Swalayan/Toko Modern.
62. Izin Usaha Perdagangan Minuman.
63. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah.
64. Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Bagi Industri Kecil dan Menengah.
65. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ikatan Pemerhati Psikologi Industri (IPPI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
66. Izin Kemetrologian.
67. Izin Hiburan Umum.
68. Izin Usaha Pertanian (yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten).
69. Izin Usaha Produksi Benih Pertanian.
70. Izin Penggilingan Padi.
71. Izin Usaha Perkebunan (IUP).
72. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B)
73. Izin Usaha Penangkar/Pedagang Benih/Bibit Perkebunan.
74. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan.
75. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan.
76. Izin Usaha Pengecer (Toko, retail, dan sub distributor) obat hewan.
77. Izin Praktek Dokter/Mantri Hewan.
78. Izin Usaha Peternakan.
79. Izin Jagal.
80. Izin Pematangan Ayam (Skala Besar).
81. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
82. Izin Reklame.
83. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
84. Izin Praktek Psikiater.

85. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
86. Izin Kapal Pengangkut Ikan.
87. Izin Pencucian Kendaraan Bermotor/Mobil.
88. Izin Rekomendasi Untuk Kegiatan Penelitian/Riset Penelitian/Riset/Survey/Magang/ Pengumpulan Data dan Bakti Sosial Kepada Masyarakat.
89. Izin Kajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit.
90. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
91. Izin Usaha Perhotelan/Penginapan.
92. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran.
93. Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
94. Izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI).
95. Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Pelayanan Nonperizinan di DPMPTSP yakni sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Surat Keterangan Berusaha (SKB).
3. Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Tanda Daftar Industri (TDI).
7. Pendaftaran Peternakan Rakyat.
8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
9. Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR).
10. Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal),
11. Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).

12. Surat Tanda Daftar Waralaba (STWP).
 - (a) Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri;
 - (b) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri;
dan
 - (c) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.
13. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
15. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)
16. Surat Tanda Daftar Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)
17. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).
18. Rekomendasi Bebas Banjir.
19. Rekomendasi Surat Permohonan Persetujuan Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).
20. Rekomendasi Tandan Buah Segar (TBS).
21. Rekomendasi Lahan Pertanian.
22. Rekomendasi Pengecer Pupuk Pesticida.
23. Rekomendasi Pengembangan Budidaya Pertanian.
24. Rekomendasi Uji Laboratorium Pakan Ternak.
25. Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
26. Sertifikat Laik Sehat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
27. Sertifikat Laik Sehat Jasaboga (Catering dan Rumah Makan/Restoran).
28. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.
29. Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
30. Pembatalan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 065/3517/ORG tanggal

28 Desember 2021 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2021, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon II (Kepala Dinas)
 3. Eselon III (Sekretaris)
 - a. Eselon IV (Kasubbag)
 4. Eselon III (Kepala Bidang)
- B. Akuntabilitas Keuangan
 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2021 bertanda tangan
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan kondisi ideal dan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Visi diperlukan untuk menjadi tuntunan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktifitas organisasi. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat sesuai dinamika kehidupan, citra dan peran Pemerintah Kabupaten serta kepekaannya pada situasi yang ada. Selain itu, visi harus inspiratif dan dapat memberi motivasi kepada suatu anggota organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **“Tewujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”** (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.

B. Misi RPJMD

Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Dikaitkan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) terkait erat dengan penjabaran Misi ke 1 RPJMD yaitu **“Berkarya Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya”**

dan Misi ke 5 RPJMD yaitu ***“Membangun Sinergitas yang baik antar Tigkat Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”***.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan sebuah misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adanya tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan karena telah ditetapkan tujuan apa yang akan di capai sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disepakati. Adapun tujuan yang mau di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 2018 – 2023 yaitu :

- 1) Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut
- 2) Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 3) Terwujudnya Peningkatan Tatakelola Administrasi Perkantoran

2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut kedalam sasaran. Oleh karena itu sasaran harus terinci dan terukur. Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut
- 2) Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan

- 5) Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
- 6) Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, Perizinan Tertentu
- 7) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- 8) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
- 9) Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum, dan Kepegawaian
- 10) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan.

Penjabaran tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	25%	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan iklim investasi	Meningkatkan pelayanan dan promosi potensi investasi
					Meningkatkan Pemantauan dan Pengawasan investasi terhadap pelaku usaha
					Penguatan regulasi dan pengembangan penanaman modal

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	80 (Baik)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan
					Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur DPMPTSP
					Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan
					Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dinas

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama/ <i>Outcome</i> /Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	$\frac{\sum \text{Investasi tahun } n}{\sum \text{Target tahun } n} \times 100\%$ <p>Prosentase meningkatnya Investasi 5% Per Tahun</p>	Kepala Dinas, Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<p>Hasil Survey</p> <p>80 (delapan puluh) / Baik</p>	Kepala Dinas, Bidang Data Informasi dan Pengaduan

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka DPMPTSP juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2021. Perjanjian Kinerja

ditanda tangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Eselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, DPMPTSP juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dengan Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Perjanjian Kinerja SKPD DPMPTSP adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESSELON II (KEPALA DINAS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	931.824.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80

ESSELON III (SEKRETARIS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian 2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	100% 100% 80

ESSELON III (KABID PENANAMAN MODAL)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	2. Persentase Pelayanan Penanaman Modal	Naik 5% (221)
3	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3. Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%

ESSELON III (KABID DATA INFORMASI DAN PENGADUAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi	100%

ESSELON III (KABID PERIZINAN DAN NONPERIZINAN JASA USAHA)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	(5%) 2.757 Izin

ESSELON III (KABID PERIZINAN TERTENTU)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	(5%) 479 Izin

ESSELON IV (KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD yang tersusun	2 Dok 2 Dok

ESSELON IV (KASUBBAG KEUANGAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	48 Dok

ESSELON IV (KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	1. Persentase Dokumen Administrasi Umum SKD	100%
2	Melaksanakan Urusan Kepegawaian SKPD	2. Persentase Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	100%

F. Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021.

1. Sasaran RPJMD

Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu komponen SKPD yang melaksanakan Sasaran pada misi ke 1 RPJMD yaitu Berkarya Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya dan misi ke 5 RPJMD yaitu Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp 000.000,00)		Realisasi (Rp 000.000,00)		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4		5		6	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi	887.456	931.824	947.084	415.566	104	44,60
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Lainnya	Nilai IKM	80	80	89,39	89,46	117,74	111,83

a. Nilai Investasi

Adapun target realisasi investasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Rp 931.824.000.000,00 dan realisasinya hingga triwulan III mencapai Rp 415.566.000.000,84. Berikut ini tabel dari realisasi investasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021:

Tabel 3.2 Realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan 2021

No.	Nama Usaha	Jumlah	
		2020	2021
1	SKB		
	• Perorangan	699	602
	• CV	305	289
	• PT	182	176
	• Badan Usaha Lainnya	9	0

b. Nilai IKM

Dari keseluruhan kuesioner (150 kuesioner) dapat terisi dengan baik hingga dapat diolah dan dianalisa lebih lanjut, dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut diperoleh dari hasil pengukuran berdasarkan 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu:

- 1) Persyaratan Pelayanan
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Sarana dan Prasarana
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 kualitas unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 89,46

dengan angka indeks sebesar 89,46 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat : 81,26-100.

Tabel 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2020	Tahun 2021
89,39	89,46

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu berbenah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan baik dari kejelasan prosedur, sistem perizinan terpadu selalu *update* dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan.

2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas (Eselon II)

Akuntabilitas Kepala DPMPTSP dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Demikian juga halnya dengan pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretaris dan para Kepala Bidang. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

Kepala DPMPTSP berusaha untuk mewujudkan sasaran strategis DPMPTSP yang terdiri dari meningkatnya investasi di Kabuapten Tanah Laut dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan. Adapun sasaran strategis yang diampu oleh Kepala DPMPTSP dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	931.824.000.000,00	415.566.000.000,84	44,60

2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	89,46	111,83
---	---	----------------------------	----	-------	--------

Berdasarkan tabel diatas, Akuntabilitas Kinerja Kepala DPMPTSP dapat dilihat dari serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan dari 5 Program yang dilaksanakan. Dengan rincian 12 Kegiatan, 29 Sub Kegiatan. Dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan tersebut terdapat 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dari 2 Program yang berbeda yang tidak dapat dilaksanakan. Yakni Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berisi pameran dikarenakan masih berlangsungnya Pandemi Covid 19. Selain itu Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tidak dijalankan karena adanya penghapusan anggaran pada Sub Kegiatan tersebut. Dengan mengabaikan 2 Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan ini, maka apabila dirata-ratakan serapan anggaran yang berhasil dicapai adalah 64,02% dari target 100 persen yang dimuat dalam perjanjian kinerja.

Namun, apabila dilihat dari realisasi fisik kegiatan maka data realisasi fisik yang dicapai menunjukkan semua program kegiatan mencapai 93%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target fisik kegiatan dapat tercapai meskipun dana yang terserap hanya berkisar 64,02%. Penyerapan anggaran yang lebih kecil dibanding realisasi fisik ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi pandemi yang masih berlangsung di tahun 2021. Dengan kondisi pandemi yang terjadi, banyak rapat-rapat kordinasi secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan kegiatan rapat secara daring (dalam jaringan) atau secara online, serta kegiatan pameran yang gagal

dilaksanakan. Meskipun demikian, secara kinerja fisik, sebagian besar target fisik dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, terjadi efisiensi anggaran, dimana biaya yang semestinya dikeluarkan dalam hal ini tidak perlu dikeluarkan, namun hasil yang ingin dicapai tetap dapat diperoleh.

3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris (Eselon III)

Sekretaris DPMPTSP mengampu 1 Program untuk mewujudkan sasaran Kinerja Sekretaris DPMPTSP yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Adapun Program-program yang diampu oleh Sekretaris DPMPTSP dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%
		2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	100%
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	B	-	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekretaris DPMPTSP mengampu 1 sasaran strategis yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dengan 3 indikator kinerja yakni persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian yang terealisasi 100%. Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan direalisasikan 100%. Sedangkan nilai akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah SKPD ditargetkan memperoleh nilai B dan masih menunggu hasil penilaian/reviu dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Umum SKPD	100%	100%	100% Laporan Pemeliharaan, Laporan Barang Pakai Habis, Laporan Pemanfaatan, Laporan Belanja Modal, laporan Pengamanan dan Pemeliharaan, KIR, KIB, RKBMD, dan <i>Stock Opname</i>
2.	Melaksanakan Urusan Kepegawaian SKPD	Persentase Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100% DUK, Penjagaan Cuti PNS, Penjagaan Berkala, dan Penjagaan Pangkat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian memiliki sasaran kinerja berupa melaksanakan pengelolaan urusan umum SKPD dengan indikator kinerja persentase dokumen administrasi umum SKPD terdiri dari Laporan Barang Pakai Habis, Laporan Pemanfaatan, Laporan Belanja Modal, laporan Pengamanan dan Pemeliharaan, KIR, KIB, RKBMD, dan *Stock Opname* yang realisasinya mencapai 100%. Untuk sasaran melaksanakan urusan kepegawaian SKPD dengan indikator persentase jenis dokumen administrasi kepegawaian yang realisasinya berhasil mencapai target 100% dengan 1 dokumen yakni DUK, Penjagaan Cuti PNS, Penjagaan Berkala, dan Penjagaan Pangkat.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan

Akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	100% Lakip, LPPD
		Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	100% Renja 2022 dan Renja Perubahan 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Perencanaan mengampu 1 Kegiatan yang terdiri atas 1 sub kegiatan untuk mencapai kinerja berupa menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Jumlah laporan dan evaluasi kinerja SKPD dan jumlah dokumen perencanaan.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Perencanaan berjumlah Rp 6.415.190,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 3.870.900,- atau sekitar 60,34%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100%.



Kegiatan Rapat Pembahasan Renja Perubahan 2021

3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan

Akuntabilitas kinerja Kasubbag keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	48 Dok	66 Dok	137,5% 12 Dokumen Lap. Bendahara Penerimaan, 33 Dok Lapcapkir Kasubbag Keuangan, 24 Dok Lap. Bendahara pengeluaran, 1 CALK

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Keuangan mengampu 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa menyusun dan merencanakan administrasi keuangan dengan indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan. Jumlah dokumen laporan keuangan memiliki target 48 dokumen dan realisasinya berjumlah 66 dokumen yang terdiri dari 12 Dokumen Laporan Bendahara Penerimaan, 33 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan, 24 Dokumen Laporan Bendahara Pengeluaran, dan 1 Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK). Sehingga target kegiatan tersebut 137,5%.

4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu

Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tertentu mengampu 1 Program bersama 2 Kepala Bidang Lainnya (Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha) yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal untuk mewujudkan sasaran Kinerjanya yaitu meningkatkan penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu. Terkait realisasi dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu	(5%) 479 Izin	410 Izin	85,59%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis bidang yakni meningkatnya pelayanan penanaman modal dengan indikator kinerja persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu mempunyai target 479 izin dan realisasinya sebanyak 410 Izin sehingga menghasilkan angka capaian 85,59%. Adapun faktor yang menyebabkan target tidak tercapai yakni adanya kewenangan perizinan tertentu yang ditarik dari DPMPTSP.



5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha

Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha mengampu 1 Program bersama 2 Kepala Bidang Lainnya (Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha) yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal untuk mewujudkan sasaran kinerjanya yaitu meningkatkan penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu. Terkait realisasi dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha	(5%) 2.757 Izin	2.493 Izin	90,42%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha mengampu 1 sasaran strategis yakni meningkatnya pelayanan penanaman modal dengan indikator kinerja persentase pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha. Adapun sasaran strategis ini memiliki target sebesar 2.757 izin dan realisasinya mencapai 2.493 izin dan capaian kinerja 90,42%.

	
<p><i>Kegiatan Penertiban Perizinan Sarang Walet Tahun 2021</i></p>	<p><i>Kegiatan Perizinan BPKP Tahun 2021</i></p>

6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan

Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan mengampu 1 sasaran strategis yaitu meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal dengan 1 indikator kinerja yaitu persentase pengelolaan data dan informasi yang ditargetkan turun 5% (119 aduan) dari target tahun lalu dengan realisasi 4 aduan sehingga aduan mengalami penurunan mencapai 96,8%. Capaian kinerja memperoleh hasil 1.936%. Permohonan perizinan dan nonperizinan yang mencapai realisasi 3.100 izin dari target yang dipasang yakni naik 5% (3.236 izin).



7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal

Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	100
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	Naik 5% (221)	237 Buah	107,24
3.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Penanaman Modal mengampu 3 sasaran strategis yakni meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator kinerja persentase pelaku usaha yang besaran targetnya ditentukan naik 5% atau 221 buah berhasil direalisasikan sebanyak 237 buah yang artinya pelaku investasi mengalami kenaikan 107,24%. Selanjutnya sasaran strategis meningkatnya pelayanan penanaman modal dengan indikator kinerja persentase pelayanan penanaman modal yang targetnya ditentukan 100% berhasil direalisasikan 100%. Sasaran strategis ketiga sekaligus terakhir yakni meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator kinerja persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang targetnya ditentukan sebesar 100%, dapat direalisasikan 100%.

	
<p><i>Kegiatan Rapat Ekspose Izin Lokasi Tahun 2021</i></p>	<p><i>Kegiatan Pengawasan Tahun 2021</i></p>

B. Akuntabilitas Keuangan

Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2020

Tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang terdapat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 5.796.960.239,40 yang terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut tabel belanja tidak langsung tahun 2020 :

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.105.983.172,00	1.495.913.996,00	71,03%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.348.289.372,40	1.538.960.554,00	65,54%
	Total	4.454.272.544,40	3.304.874.550,00	74,20%

b) Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) kegiatan.

DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2020 dengan anggaran sebesar 1.342.687.695,00 dengan program sebanyak 11 (sebelas) program yang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) kegiatan tersebut seluruhnya telah terealisasi.

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

a) Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut tabel belanja tidak langsung tahun 2021 :

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.150.734.286,00	1.224.356.862,00	56,93
	Belanja Tambahan	2.546.273.730,00	1.558.500.116,00	61,21

2.	Penghasilan PNS			
	Total	4.697.008.016,00	2.782.856.978,00	59,25

Total belanja tidak langsung setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 4.697.008.016,00, seluruhnya untuk belanja pegawai, yaitu berupa gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan. Adapun Realisasi Belanja Tidak Langsung ini adalah sebesar Rp 2.782.856.978,00 atau 59,25% dari anggaran.

b) **Belanja Langsung**

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2021 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 5(lima) program yang terdiri atas 12 (dua belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Dengan adanya pandemi Covid 19, dilakukan penyesuaian anggaran pada Tahun 2021. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 total anggaran adalah sebesar Rp 6.584.459.044,00. Kemudian dilakukan Perubahan Anggaran mendahului Perubahan APBD dengan Total Anggaran sebesar Rp 7.043.963,524 ,00.

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2021 ini digunakan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan DPMPTSP, yang terdiri atas 5 (lima) program yang terdiri atas 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut adalah Realisasi Belanja DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 :

Realisasi Anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2021 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Belanja Langsung			

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Barang dan Jasa	2.134.601.158,00	1.197.008.593,00	56,08%
	Belanja Bahan Pakai Habis	481.362.020,00	270.027.300,00	56,10%
	Belanja Jasa Kantor	657.069.900,00	486.745.614,00	74,10%
	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	22.340.808,00	21.064.535,00	94,29%
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	66.276.000,00	-	-
	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	-	-	-
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	74.750.000,00	99,67%
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147.260.000,00	94.360.500,00	64,10%
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	675.292.430,00	250.060.644,00	37,03%
2	Belanja Modal			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.664.350,00	79.908.250,00	96,67%
	Belanja Modal Alat Kantor	13.200.000,00	12.600.000,00	95,45%
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.708.110,00	26.200.000,00	98,10%
	Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	9.500.000,00	95%
	Belanja Modal Alat Komputer Unit	32.756.240,00	31.608.250,00	96,50%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	129.690.000,00	129.000.000,00	99,47%
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	129.690.000,00	129.000.000,00	99,47%
	Jumlah	2.346.955.508,00	1.405.916.843,00	59,90%

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2021 dengan total anggaran sebesar Rp6.879.696.944,00, terdiri dari Jumlah Program sebanyak 5 (lima) dan 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Dari kegiatan/sub kegiatan tersebut ada satu sub kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total dana Rp 25.000.000,00. Hal ini tidak dapat direalisasikan karena masih dalam masa Pandemi Covid-19, sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak dihindari. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.922.924.494,00	3.772.121.971,00	63,69
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.065.770,00	13.213.700,00	29,32
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.415.190,00	3.870.900,00	60,34
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.650.580,00	9.342.800,00	68,44
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	-	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.704.734.806,00	2.787.905.978,00	59,25

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.697.008.016,00	2.782.856.978,00	59,24
b.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.994.100,00	1.605.000,00	80,49
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.307.200,00	828.000,00	79,83
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.425.490,00	2.616.000,00	59,11
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.659.720,00	28.825.233,00	97,19
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.659.720,00	28.825.233,00	97,19
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.950.000,00	100.263.000,00	98,35
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.950.000,00	25.513.000,00	94,67
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	74.750.000,00	99,67
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.681.540,00	321.490.644,00	85,35
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.866.840,00	4.285.000,00	88,04
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.846.270,00	62.876.000,00	88,75
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.731.000,00	33.428.500,00	73,10

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000,00	1.540.000,00	23,33
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.637.430,00	219.361.144,00	88,23
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.572.658,00	426.062.916,00	82,32
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.075.900,00	82.361.614,00	52,10
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.976.040,00	26.695.000,00	89,05
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	329.520.718,00	317.006.302,00	96,20
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.260.000,00	94.360.500,00	64,08
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.910.000,00	75.465.500,00	64,00
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.350.000,00	18.895.000,00	64,38
B.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	179.215.100,00	8.154.500,00	4,55
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
a.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	-	-	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Kemudahan Penanaman Modal			
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	179.215.100,00	8.154.500,00	4,55
a.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	179.215.100,00	8.154.500,00	
C.	Program Pelayanan Penanaman Modal	426.215.310,00	135.714.150,00	31,84
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	426.215.310,00	135.714.150,00	31,84
a.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	327.689.920,00	93.971.150,00	28,68
b.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	62.999.730,00	21.384.000,00	33,94
c.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	19.525.660,00	18.877.000,00	96,68
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	16.000.000,00	1.482.000,00	9,26
D	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	397.937.800,00	50.152.750,00	12,60
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	397.937.800,00	50.152.750,00	12,60

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	334.937.900,00	28.448.000,00	8,49
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	62.999.900,00	21.704.750	34,45
E.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	117.940.820,00	93.630.450,00	79,39
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.940.820,00	93.630.450,00	79,39
a.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	117.940.820,00	93.630.450,00	79,39
	Jumlah	7.043.963.524,00	4.059.773.821,00	57,63%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Berikut akan digambarkan perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2020 dan Tahun 2021. Perbandingan yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara paralel program kegiatan dan sub kegiatan karena perubahan nama dan susunan program/kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021. Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk penyusunan dan

penamaan program, kegiatan, hingga sub kegiatan mengalami perubahan.

Untuk melihat perbandingan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran/Pagu (Rp)		Realisasi (%)	
	2020	No.	2021	2020	2021	2020	2021
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	761.600.595,-	1.225.916.478,-	92,47	54,41
1.	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.460.200,-	517.572.658,-	87,27	82,32
		6.a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	158.075.900,-	NA	52,10
		6.b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	29.976.040,-	NA	89,05
		6.c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	329.520.718,-	NA	96,20
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	7.456.790,-	NA	67,71
		2.a.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	1.994.100,-	NA	80,49
		2.b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	1.307.200,-	NA	79,83
		2.c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	NA	4.425.490,-	NA	59,11
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	NA	29.659.720,-	NA	97,19
		3.a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	29.659.720,-	NA	97,19
		5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA	376.681.540,-	NA	85,35
		5.a.	Penyediaan Komponen Instalasi	NA	4.866.840,-	NA	88,04

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran/Pagu (Rp)		Realisasi (%)	
	2020	No.	2021	2020	2021	2020	2021
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		5.b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	70.846.270,-	NA	88,75
		5.c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	NA	45.731.000,-	NA	73,10
		5.d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	NA	6.600.000,-	NA	23,33
2.	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	5.e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.448.000,-	248.637.430,-	90,67	88,23
3.	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD		NA	242.692.395,-	NA	99,70	NA
B	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		NA	248.155.000,-	NA	83,54	NA
1.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.155.000,-	147.260.000,-	83,54	64,08
		7.a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	117.910.000,-	NA	64,00
		7.b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	29.350.000,-	NA	64,38
		4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NA	101.950.000,-	NA	98,35
2.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	4.a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	75.000.000,-	0	99,67
3.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	4.b.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	NA	29.950.000,-	NA	94,67
C.	Program Perencanaan,	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan	13.999.400,-	45.065.770,-	82,27	29,32

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran/Pagu (Rp)		Realisasi (%)	
	2020	No.	2021	2020	2021	2020	2021
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan laporan keuangan	1.b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.900,-	13.650.580,-	87,49	68,44
2.	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	1.c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.999.900,-	25.000.000,-	77,25	0
3.	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	1.a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.900,-	6.415.190,-	79,48	60,34
D.	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		NA	90.000.000,-	NA	77,49	NA
1.	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD		NA	70.000.000,-	NA	99,63	NA
2.	Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan		NA	20.000.000,-	NA	0	NA
E.	Program Pengembangan Investasi Daerah	B.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	96.186.400,-	179.215.100,-	80,38	4,55
1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	18.290.0000,-	179.215.100,-	90,40	4,55
		2.a.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	NA	179.215.100,-	NA	4,55
		C.	Program Pelayanan Penanaman Modal	NA	426.215.310,-	NA	31,84
		1.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	NA	426.215.310,-	NA	31,84
2.	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan nonperijinan penanaman modal	1.a.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	26.349.500,-	327.689.920,-	95,36	28,68

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran/Pagu (Rp)		Realisasi (%)	
	2020	No.	2021	2020	2021	2020	2021
			Terintegrasi secara Elektronik				
		1.b.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	NA	62.999.730,-	NA	33,94
3.	Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi		NA	51.546.900,-	NA	69,16	NA
F.	Program Peningkatan Perijinan dan Non Perijinan		NA	67.064.300,-	NA	94,43	NA
1.	Penyusunan/revisi standar operasional prosedur		NA	11.549.800,-	NA	81,19	NA
		E.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	NA	117.940.820,-	NA	79,39
		1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	117.940.820,-	NA	79,39
2.	Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan	1.a.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6.167.000,-	117.940.820,-	95,12	79,39
3.	Penyebarluasan informasi pelayanan publik		NA	39.347.700,-	NA	99,17	NA
4.	Survey kepuasan masyarakat	C.1 .c.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	9.999.800,-	19.525.660,-	90,62	96,68
G.	Program Peningkatan Realisasi Perijinan		NA	20.225.000,-	NA	99,78	NA

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran/Pagu (Rp)		Realisasi (%)	
	2020	No.	2021	2020	2021	2020	2021
	dan Non Perijinan Pelaku Jenis Usaha						
1.	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis usaha		NA	16.625.000,-	NA	99,73	NA
2.	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis usaha	C.1 .d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3.600.000,-	16.000.000,-	100,00	9,26
H.	Program Peningkatan Realisasi Pelaku Perijinan dan Non Perijinan Jenis Non Usaha		NA	25.457.000,-	NA	98,83	NA
1.	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis non usaha		NA	22.500.000,-	NA	100,00	NA
2.	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis non usaha		NA	2.957.000,-	NA	89,96	NA
	NA	D.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	NA	397.937.800,-	NA	12,60
	NA	1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	NA	397.937.800,-	NA	12,60
	NA	1.a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	NA	334.937.900,-	NA	8,49
	NA	1.b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	NA	62.999.900,-	NA	34,45

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2020) dan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2021)**.

Program ini isinya relatif sama, walaupun namanya berbeda. Hal ini disebabkan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terbaru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tahun 2021, terdapat penyederhanaan pengelompokan kegiatan dan sub kegiatan, sehingga Sekretariat hanya mengampu 1 program, lebih sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengampu 4 program. Pada tahun 2020 1 program ini merangkum 3 kegiatan yaitu (1) kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran; (2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi; (3) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD. Rerata dari serapan 3 kegiatan yang ada di tahun 2020 menunjukkan hasil serapan sebesar 92,47%, sedangkan di tahun 2021 tercapai 54,41%. Walaupun serapan anggaran di tahun 2021 tidak begitu tinggi namun indikator kinerja berhasil dipenuhi dengan baik. Pada tahun 2021 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup (1) kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dari 6 kegiatan tersebut, masing-masing memiliki beberapa turunan sub kegiatan. Apabila tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 dari segi efisiensi penamaan program, tahun 2021 yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mampu merangkum 4 program (tahun 2020) menjadi 1 program.

2) Program Pengembangan Investasi Daerah (2020) dan **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (2021).**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada program ini memiliki kemiripan nama namun apabila dilihat kegiatan/sub kegiatannya terdapat perbedaan, ditambah pada tahun 2021 kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan ini telah dinaungi program tersendiri yakni Program Pelayanan Penanaman Modal yang realisasi anggarannya mencapai 31,84%. Pada tahun 2021 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal berisi kegiatan(sub kegiatan) yakni Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota) yang realisasi anggarannya mencapai 4,55%. Rendahnya penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini disebabkan oleh masih berlangsungnya Pandemi Covid-19.

3) Program Peningkatan Perijinan dan Non Perijinan (2020) dan **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal serta Program Pelayanan Penanaman Modal (2021)**

Di antara 2 program ini tidak bisa dibandingkan secara paralel dikarenakan adanya nomenklatur baru, terdapat beberapa kegiatan di tahun 2020 yang tidak terklasifikasikan dalam program di tahun 2021. Seperti kegiatan di tahun 2020 Survey Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2021 diklasifikasikan ke dalam sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Apabila performa realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021, tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan capaian 96,68%, mengalami peningkatan sebesar 6,06%. Selain itu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang pada tahun 2020 diampu 3 bidang secara terpisah, pada tahun 2021

dikolektifkan menjadi 1 sub kegiatan yang diampu secara bersama-sama oleh 2 bidang (Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha serta Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu). Adapun realisasi anggaran hanya terserap sebanyak 9,26% yang disebabkan oleh adanya larangan diadakannya rapat tim teknis selama Pandemi Covid-19.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (2021)

Program ini baru saja muncul pada tahun anggaran 2021. Program ini menaungi kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan tersebut diklasifikasikan lagi ke dalam 2 sub kegiatan seperti sebagai berikut:

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan ini merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang realisasinya mencapai hanya di angka 8,49%. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menghalangi jalannya sub kegiatan ini.

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Realisasi keuangannya sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mencapai 34,45%.

Data Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Tahun 2021 terhadap Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	
		2020	2021	2020	2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.105.983.172,00	2.150.734.286,00	1.495.913.996,00 56,93%	1.224.356.862,00 71,03%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.348.289.372,40	2.546.273.730,00	1.538.960.554,00 61,21%	1.558.500.116,00 65,54%
	Total	4.454.272.544,40	4.697.008.016,00	3.304.874.550,00 59,25%	2.782.856.978,00 74,20%

Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Program	8	5
2	Jumlah Kegiatan	22	12
3	Jumlah Sub Kegiatan	-	29
4	Jumlah Anggaran	Rp 1.342.687.695,00	Rp 2.346.955.508,00
5	Realisasi Anggaran	Rp 1.197.269.416,00	Rp 1.276.916.843,00
	% Realisasi Anggaran	89,17%	54,41%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini diketahui bahwa :

1. Pada Anggaran Murni tahun 2021, DPMPTSP mengelola Anggaran sebesar Rp 6.584.459.044,00 yang kemudian anggaran tersebut menjadi meningkat pada APBD Perubahan 2021 menjadi Rp 7.043.963.524,00.
2. Belanja Langsung DPMPTSP pada Anggaran Murni 2021 sebesar Rp 1.847.751.028,00 yang kemudian anggaran ini terkoreksi meningkat menjadi Rp 2.346.955.508,00 pada APBD 2021 Perubahan.
3. Belanja Tidak Langsung DPMPTSP pada Anggaran Murni 2021 sebesar Rp 4.697.008.016,00. Pada APBD 2021 Perubahan anggaran belanja tidak langsung tidak mengalami peningkatan ataupun pengurangan dalam sisi jumlah namun mengalami pergeseran pada komponen tunjangan jabatan ASN yang bertambah sebesar Rp 4.000.000,00. Kemudian anggaran tersebut dialokasikan ke dalam tunjangan fungsional umum ASN.
4. Pada laporan kinerja tahun 2021 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level Eselon II, Eselon III, hingga level Eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan penelaahan terhadap kinerja SKPD yang diuraikan diatas dapat disampaikan beberapa strategi peningkatan Kinerja pada DPMPTSP Tanah Laut yaitu :

1. Penyusunan anggaran yang lebih efisien dan efektif, penyusunan anggaran harus lebih hemat dan menghindari penyusunan anggaran yang cenderung sama dan rutin setiap tahun.

2. Karena adanya pengurangan anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022. Oleh karena itu penghematan anggaran harus dilakukan pada level perencanaan, menghitung keperluan minimal dan menyerap anggaran secara maksimal.
3. Meningkatkan kualitas jaringan untuk mengoptimalkan pelayanan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP)
4. Perlu adanya Bimbingan Teknis untuk Tim Teknis dan seluruh ASN di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut terkait sistem OSS yang sudah diberlakukan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten : Tanah Laut
 Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
 b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
 d. Pelaksanaan administrasi dinas
 e. Pembinaan UPT Dinas; dan
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/sumber data
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	1 Tingkat Investasi Daerah	$\frac{\sum \text{Investasi tahun } n}{\sum \text{Target tahun } n} \times 100\%$ Prosentase meningkatnya Investasi 5% Per Tahun	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2 Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey 80 (delapan puluh) / Baik	Bidang Data, Informasi dan dan Pengaduan

KEPALA DPMPTSP


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si.
 NIP.196501161992031008



INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Nomor : 700/ 246 / LHE – Insp/ 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2020

Pelaihari, 3 September 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
Kab.Tanah Laut
di-

Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP 135/M/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/283/Insp/2021 tanggal 23 Agustus 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tanah Laut dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (Lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja organisasi sesuai hasil perbaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 71.72 dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Evaluasi Internal

- Perlu dilaksanakannya evaluasi terhadap rencana aksi dan dilakukan perbaikan dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

Pencapaian Kinerja :

- Informasi yang disajikan agar digunakan dalam pelaksanaan dalam perbaikan perencanaan;
- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, dengan beberapa rekomendasi tersebut di atas untuk ditindak lanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Inspektur,

Drs. H. Syahrin Nurdin, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19641112 198503 1 015

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
3. Menteri PAN dan RB di Jakarta
4. Arsip

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	81.58%	24.48
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10.00	86.25%	8.63
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2.00	100.00%	2.00
1	Renstra SKPD telah disusun	Y	1.00	
2	Renstra telah memuat tujuan	Y	1.00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1.00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5.00	87.50%	4.38
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1.00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0.75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	B	0.75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	B	0.75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	B	0.75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3.00	75.00%	2.25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	B	0.75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	B	0.75	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	B	0.75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	79.25%	15.85
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4.00	93.75%	3.75
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1.00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IKU	B	0.75	OK
4	PK telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10.00	85.00%	8.50
5	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0.75	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	B	0.75	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	B	0.75	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	B	0.75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	B	0.75	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1.00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	B	0.75	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6.00	60.00%	3.60
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0.75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	B	0.75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan	B	0.75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	B	0.75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	60.00%	15.00
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	81.25%	4.06
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	B	0.75	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. S U K A M T A
Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2021

Pihak Kedua,


H. S U K A M T A

Pihak Pertama,


Drs, JOKO WURYANTO, M.Si
NIP 1965011161992031008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. AMINAH
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, Januari 2021
Sekretaris,

Dra. Hj. A M I N A H
NIP. 196312231990032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian 2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	100% 100% 80

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			4. Penyediaan Barang Cetak dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EMROHAYAT, S.Pt
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, 19 April 2021
Kepala Bidang Penanaman Modal

EMROHAYAT, S.Pt
NIP. 197311101993031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	2. Persentase Pelayanan Penanaman Modal	Naik 5% (221)
3.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3. Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepala Dinas,

Pelaihari, 19 April 2021
Kepala Bidang Penanaman Modal,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008


EMROHAYAT, S.Pt
NIP. 197311101993031003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SURIANSYAH, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, Januari 2021
Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha,

H. SURIANSYAH.S.Sos.
NIP. 196703061992031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	(5%) 2.757 Izin

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Kepala Dinas,



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, Januari 2021
Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha,



H. SURIANSYAH.S.Sos.
NIP. 196703061992031006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos,
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN TERTENTU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, Januari 2021
Kepala Bidang Perizinan Tertentu,

BUDI ANDRIAN SUTANTO.S.Sos,
NIP. 197602182007011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	(5%) 479 Izin

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Kepala Dinas,



Drs, JOKO WURYANTO, M.Si
NIP 1965011161992031008

Pelaihari, Januari 2021
Kepala Bidang Perizinan Tertentu,



BUDI ANDRIAN SUTANTO.S.Sos,
NIP. 197602182007011006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP 1965011161992031008

Pelaihari, Januari 2021
Kepala Bidang Data, Informasi
Dan Pengaduan

DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
NIP. 19820822000122003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHELVEY NURMULIAWATI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. Hj. AMINAH
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Januari 2021
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,

SHELVEY NURMULIAWATI, SE
NIP.198507082010012019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD yang tersusun	2 Dok 2 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sekretaris,



Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Januari 2021
Kasubbag Program dan Pelaporan,



SHELVEY NURMULIAWATI, SE
NIP.198507082010012019



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. BARMİYATI, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. Hj. AMINAH
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Januari 2021
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Hj. BARMİYATI, S.Sos
NIP. 196403121986032017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	1. Persentase Dokumen Administrasi Umum SKPD	100%
2	Melaksanakan Urusan Kepegawaian SKPD	2. Persentase Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	100%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Pereturan Perundang-Undangan
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1013 118 1484 271">1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <li data-bbox="1013 306 1484 370">2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sekretaris,



Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Januari 2021
 Kasubbag Umum dan
 Kepegawajan,



Hj. BARMİYATI, S.Sos
NIP. 196403121986032017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. Hj. AMINAH
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Januari 2021
Kasubbag Keuangan,

Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP. 196605141994012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	48 Dok

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sekretaris,



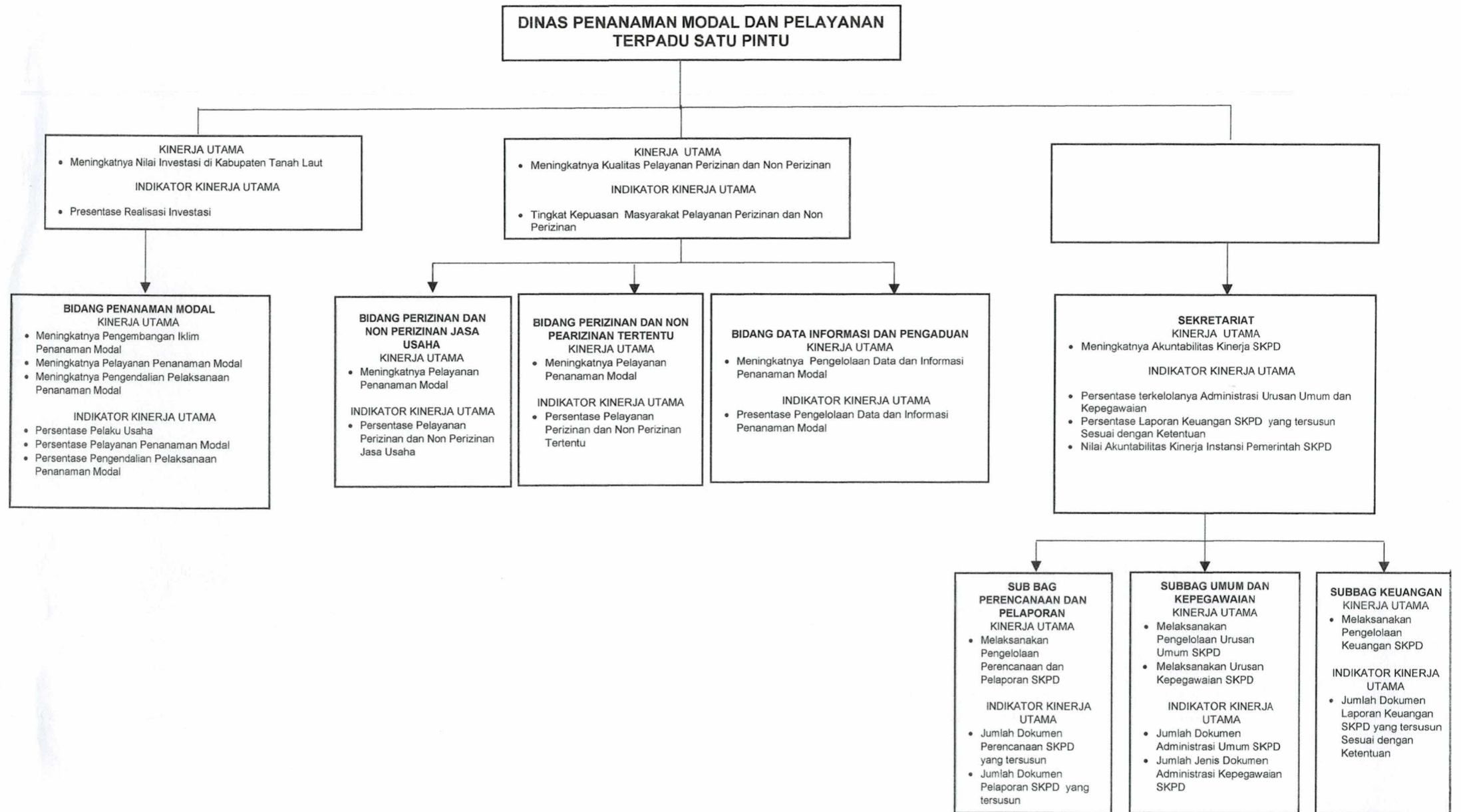
Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Januari 2021
 Kasubbag Keuangan,



Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP.196605141994012001

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT




LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
TRIWULAN I

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021	REALISASI			PERMASALAHAN/ KENDALA
					FISIK KINERJA	%	KEUANGAN	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu PINTU di Bidang Penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
I								
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Rapat	22 kali	16,000,000	2 kali	9%	1,215,000	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal	Jumlah Kecamatan	10 Kecamatan	62,999,730	4 Kecamatan	40%	265,000	
3	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Nonperijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Ijin	3429 Dokumen	327,689,920	1,104 Dokumen	32%	9,115,650	
4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	19,525,660	- Dokumen	0%	1,890,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
II								
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	117,940,820	- Dokumen	0%	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
III								
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	179,215,100	- kegiatan	0%	-	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
IV								
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	69,971,600	- Dokumen	0%	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
V								
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan	20 kali	62,999,900	- kali	0%	-	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kecamatan	10 Kecamatan	334,973,900	- Dokumen	0%	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
VI								
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	29,659,720	1 Dokumen	25%	5,752,265	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
VII								
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Barang	33 Barang	26,950,000	- barang	0%	-	

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	25	Orang	75,000,000	-	orang	0%		
VII Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	14	Bulan	4,697,008,016	3	bulan	25%	532,524,692	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan	1	Tahun	1,994,100	3	bulan	0%	570,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	1,037,200	-	Dokumen	0%	-	
4	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	48	Dokumen	4,425,490	8	Dokumen	16,67%	1,045,000	
VIII Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	9	Jenis	45,731,000	6	Jenis	66%	10,997,500	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	6	Jenis	4,866,840	1	Jenis	16,67%	1,235,000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	41	Jenis	70,846,270	10	Jenis	24,40%	26,890,500	
4	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku	44	Buku	6,600,000	-	buku	0%	-	
5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	1	Tahun	248,637,430	3	bulan	25%	5,560,000	
IX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	12	Jenis	29,350,000	3	Jenis	25%	3,325,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	10	Unit	117,910,000	4	unit	40%	15,045,800	
X Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	1	Tahun	329,520,718	3	bulan	25%	76,750,936	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	1	Tahun	158,075,900	3	bulan	25%	25,410,125	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	50	Jenis	29,976,040	25	Jenis	50%	12,525,000	
XI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	13,650,580	1	Dokumen	25%	-	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	6,415,190	1	Dokumen	50%	1,335,800	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	2	Kegiatan	25,000,000	-	Kegiatan	0%	-	

Kepala DPMPSTSP Kab. Tanah Laut

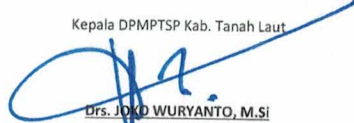

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
TRIWULAN II

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021	REALISASI			PERMASALAHAN/ KENDALA
				FISIK KINERJA	%	KEUANGAN	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
I Pelayanar Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Rapat	22 kali	16,000,000	5 kali	31,8%	267,000	
2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal	Jumlah Kecamatan	10 Kecamatan	62,999,730	3 kecamatan	70%	3,031,500	
3 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Nonperijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Ijin	3429 Dokumen	327,689,920	554 ijin	48,4%	9,105,500	
4 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	19,525,660	- Dokumen	0%	4,050,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DANA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
II Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	117,940,820	- Dokumen	0%	20,620,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
III Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	179,215,100	- kegiatan	0%	2,007,000	
IV Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberbagai Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	69,971,600	- Dokumen	0%	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
V Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan	20 kali	62,999,900	1 kali	10%	3,473,000	
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kecamatan	10 Kecamatan	334,973,900	- Dokumen	0%	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
VI Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	29,659,720	1 Dokumen	50%	3,848,555	
VII Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Barang	33 Barang	26,950,000	33 barang	100%	25,513,000	

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	25	Orang	75,000,000	-	orang	0%	-	
VII Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	14	Bulan	4,697,008,016	5	bulan	50%	836,433,356	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan	1	Tahun	1,994,100	3	bulan	0%	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPd	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	1,037,200	-	dokumen	0%	-	
4	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	48	Dokumen	4,425,490	16	dokumen	50%	-	
VIII Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	9	Jenis	45,731,000	2	Jenis	70%	6,265,000	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	6	Jenis	4,866,840	2	Jenis	50%	1,145,000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	41	Jenis	70,846,270	10	Jenis	49%	20,829,500	
4	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku	44	Buku	6,600,000	-	buku	0%	-	
5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	1	Tahun	248,637,430	3	bulan	50%	1,333,000	
IX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	12	Jenis	29,350,000	3	Jenis	50%	3,450,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	10	Unit	117,910,000	3	Jenis	50%	11,655,000	
X Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	1	Tahun	329,520,718	3	bulan	50%	53,701,228	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	1	Tahun	158,075,900	3	bulan	50%	14,421,759	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	50	Jenis	29,976,040	-	jenis	50%	-	
XI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	13,650,580	1	Dokumen	25%	-	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	6,415,190	-	Dokumen	0%	-	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	2	Kegiatan	25,000,000	-	kegiatan	0%	-	

Kepala DPMPSTSP Kab. Tanah Laut

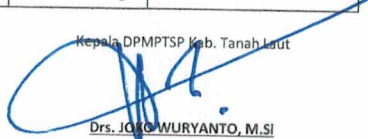

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
TRIWULAN III**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021	REALISASI			PERMASALAHAN/ KENDALA
					FISIK KINERJA	%	KEUANGAN	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
I Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Rapat	22	kali	16,000,000	-	kali	31,8%	-
2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal	Jumlah Kecamatan	10	Kecamatan	62,999,730	2	Kecamatan	90%	3,400,000
3 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Nonperijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Ijin	3429	Dokumen	327,689,920	500	ijin	62%	17,437,500
4 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	19,525,660	1	Dokumen	100%	1,350,000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
II Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	117,940,820	1	Dokumen	100%	7,206,500
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
III Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	6	Kegiatan	179,215,100	3	kegiatan	50%	2,007,000
IV Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	69,971,600	-	dokumen	0%	-
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
V Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan	20	kali	62,999,900	9	kali	50%	3,790,000
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kecamatan	10	Kecamatan	334,973,900	-	Kecamatn	0%	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
VI Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	29,659,720	1	Dokumen	75%	3,848,555
VII Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Barang	33	Barang	26,950,000	-	barang	100%	-

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	25	Orang	75,000,000	-	orang	0%	-	
VII Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	14	Bulan	4,697,008,016	3	bulan	75%	652,790,902	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan	1	Tahun	1,994,100	3	bulan	75%	280,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPd	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	1,037,200	1	Dokumen	75%	-	
4	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	48	Dokumen	4,425,490	16	Dokumen	75%	345,000	
VIII Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	9	Jenis	45,731,000	1	Jenis	100%	9,547,500	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	6	Jenis	4,866,840	-	jenis	100%	-	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	41	Jenis	70,846,270	10	jenis	75%	2,659,000	
4	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku	44	Buku	6,600,000	22	buku	50%	440,000	
5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	1	Tahun	248,637,430	3	bulan	75%	49,891,532	
IX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	12	Jenis	29,350,000	3	Jenis	75%	2,610,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	10	Unit	117,910,000	1	Unit	80%	8,740,000	
X Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	1	Tahun	329,520,718	3	bulan	75%	51,489,728	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	1	Tahun	158,075,900	3	bulan	75%	10,976,024	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	50	Jenis	29,976,040	15	Jenis	80%	5,815,000	
XI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	13,650,580	1	Dokumen	75%	-	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	6,415,190	-	Dokumen	50%	-	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	2	Kegiatan	25,000,000	-	kegiatan	0%	-	

Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008

1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Barang	33	Barang	26,950,000	-	barang	100%	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	25	Orang	75,000,000	25	Orang	100%	74,750,000
VII Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	14	Bulan	4,697,008,016	3	bulan	100%	761,108,028
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan	1	Tahun	1,994,100	3	bulan	100%	755,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	1,037,200	4	Dokumen	100%	828,000
4	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	48	Dokumen	4,425,490	16	Dokumen	100%	1,226,000
VIII Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis	9	Jenis	45,731,000				
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	6	Jenis	4,866,840	3	Jenis	100%	1,905,000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	41	Jenis	70,846,270	11	Jenis	100%	12,497,000
4	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku	44	Buku	6,600,000	22	buku	100%	1,100,000
5	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	1	Tahun	248,637,430	3	bulan	100%	150,579,612
IX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	12	Jenis	29,350,000	3	Jenis	100%	9,510,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	10	Unit	117,910,000	2	Unit	100%	40,014,700
X Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	1	Tahun	329,520,718	3	bulan	100%	135,064,410
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	1	Tahun	158,075,900	3	bulan	100%	31,553,706
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	50	Jenis	29,976,040	5	Jenis	100%	8,355,000
XI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	13,650,580	1	Dokumen	100%	9,342,800
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	6,415,190	1	Dokumen	100%	2,535,100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	2	Kegiatan	25,000,000	-	kegiatan	0%	-

Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Laut


 Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
 NIP. 19650116 199203 1 008

EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SKPD Sesuai dengan Target Renstra (2018-2023)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020
1	Persentase Kenaikan Pelaku Investasi	30	42	48	54	60	30	30	37	44	237
	Jumlah Promosi dan kerjasama investasi	2 kali	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi	5 kec/tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Persentase permohonan ijin yang di verivikasi dan divalidasi perijinan jasa usaha	2382	2501	2626	2757	2895	3040	2847	3226	2869	2493
3	Persentase permohonan ijin yang di verivikasi dan di validasi perijinan non usaha	413	434	456	479	503	828	360	547	603	410
4	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perijinan dan non perijinan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan permohonan perijinan dan non perijinan	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95
6	Persentase ketersediaan data perijinan dan non perijinan	-	2935	3082	3236	3398	3568	3207	3773	3472	3100
7	Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyerapan anggaran	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut

Drs. Joko Wuryanto, M.Si.
NIP. 19650116 199203 1 008

						Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Penyediaan Layanan dan Pengelolaan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Pelaku usaha	Jumlah Survey IKM		19.525.660	
5	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha		Persentase Permohonan Izin Yang Divalidasi Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	1. Jumlah Kesepakatan 2. Jumlah Perizinan Jasa Usaha 3. Jumlah Perizinan PM Baru 4. Jumlah Perizinan Tertentu		327.689.920	Jasa Usaha
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tim Teknis	1. Jumlah Rakor Jasa Usaha 2. Jumlah Rakor Jasa Tertentu		16.000.000	
6	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu		Persentase Permohonan Izin Yang di Validasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu.			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	1. Jumlah Kesepakatan 2. Jumlah Perizinan Jasa Usaha 3. Jumlah Perizinan PM Baru 4. Jumlah Perizinan Tertentu		327.689.920	Tertentu
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	5%		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tim Teknis	1. Jumlah Rakor Jasa Usaha 2. Jumlah Rakor Jasa Tertentu		16.000.000	
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur			Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	IKM	Baik		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	Jumlah Pengolahan Data, Penyusunan SOP dan media Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik Perizinan dan NonPerizinan		117.940.820	DIP
8	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan		Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Baik		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Seluruh Bidang di DPMPSTP	Jumlah dok		6.415.190	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Seluruh Bidang di DPMPSTP	Jumlah dok		13.650.580	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaku usaha	Jumlah pameran pembangunan dan pameran anggrek		25.000.000	

9	Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum, dan Kepegawaian		Persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Baik		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah Bulan Rapat		248,637,430
											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah Dokumen		29,659,720
											Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Seluruh Bidang di DPMTSP	1. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas 2. Jumlah Sepatu		26,950,000
											Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah Pegawai		75,000,000
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah Jenis		4,866,840
											Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah Jenis		45,731,000
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Seluruh Bidang di DPMTSP	1. Jumlah Surat Kabar 2. Jumlah Buku		6,600,000
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Seluruh Bidang di DPMTSP	1. Jumlah Jenis Internet 2. Jumlah Jenis SSL 3. Jumlah Rek Telp, Air, dan Listrik		158,075,900
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah Jenis		29,976,040
											Penyediaan Pelayanan Kantor	Seluruh Bidang di DPMTSP	1. Jumlah Org PTT 2. Jumlah Jenis Kebersihan Kantor 3. Tersedianya Materai dim Tahun		329,520,718
											Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Seluruh Bidang di DPMTSP	1. Jumlah Pemeliharaan R2 2. Jumlah Pemeliharaan R4		117,910,000
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah Jenis		29,350,000
10	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan.		Persentase Penyerapan Anggaran DPMTSP				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Baik		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah pemb. Gaji		4,697,008,016
											Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Seluruh Bidang di DPMTSP	Jumlah pelaksanaan peny. Akuntansi		1,994,100

